

## WASTE-TO-ENERGY

### 🌿 Danantara Dan Proyek Listrik Sampah: Investasi Atau Pergeseran Beban?

Published on 22 October 2025

Indonesia tengah memasuki fase baru reformasi investasi negara melalui pembentukan Danantara Indonesia, lembaga pengelola investasi yang diharapkan menjadi magnet modal global. Namun di tengah ekspektasi besar itu, muncul tanda tanya: *apakah Danantara benar-benar menggerakkan investasi strategis, atau justru sekadar memindahkan beban fiskal antarlembaga negara?*

Menurut pengamat kebijakan energi, pembentukan Danantara sejatinya bertujuan untuk menjadi **sovereign investment arm** yang menarik modal asing dan membiayai proyek strategis nasional. Namun arah pelaksanaannya kini menimbulkan pertanyaan serius. Alih-alih menjadi pendorong investasi baru, Danantara justru tampak aktif dalam proyek domestik berisiko rendah, termasuk **"kolaborasi" pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) bersama PLN**.

Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2025 menetapkan tarif listrik PLTSa **sebesar US\$0,20 / kWh**, atau sekitar 2 - 3 kali lipat harga listrik konvensional PLN, serta menugaskan PLN sebagai **pembeli tunggal (off-taker)**. Menurut berbagai analisis hukum & energi, desain tarif ini menempatkan risiko biaya penuh pada PLN tanpa skema kompensasi yang seimbang antara pemerintah, Danantara, dan investor swasta. Pejabat terkait juga telah mengonfirmasi bahwa tarif 20 sen / kWh itu telah melalui **review BPKP**, menandakan rencana tersebut siap dijalankan.

Masalahnya, kondisi keuangan PLN saat ini jauh dari ideal. Data Bloomberg Technoz menunjukkan **utang kompensasi dan subsidi pemerintah ke PLN mencapai Rp78,4 triliun per Juni 2025**, meningkat 81% dibanding akhir 2024. Dalam konteks tersebut, kebijakan yang justru menambah kewajiban PLN membeli listrik berbiaya tinggi dinilai kontraproduktif terhadap efisiensi fiskal dan stabilitas BUMN energi itu.

Sejumlah analis menilai, desain proyek ini memperlihatkan pergeseran peran Danantara. Bukannya membawa mitra investasi global dan modal asing masuk ke dalam negeri, lembaga ini malah bertindak sebagai penghubung proyek domestik yang **memindahkan risiko finansial ke PLN**. Pola semacam itu cenderung hanya mengedarkan dana di antara institusi negara tanpa menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian.

Selain itu, ulasan hukum menyoroti bahwa tarif tetap 20 sen / kWh berlaku hingga 30 tahun—jauh di atas **rata-rata feed-in tariff** energi terbarukan lain di Indonesia. Tanpa mekanisme pembagian risiko yg transparan, kebijakan ini berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi PLN & APBN. Dalam konteks ini, pengamat energi menekankan pentingnya memisahkan antara **program pengelolaan limbah kota (waste management)** dengan **transisi energi hijau**, karena keduanya memiliki tujuan & dampak fiskal yang berbeda.

Kritik juga datang dari pejabat pemerintah sendiri. Menteri Keuangan **Purbaya Yudhi Sadewa** dalam salah satu forum public pekan lalu secara terbuka mempertanyakan arah investasi Danantara yg cenderung main aman, dengan pernyataan tajam: *“Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?”* Ungkapan itu menggambarkan keheranan yang menggelitik logika, bahwa lembaga investasi negara yang seharusnya menjadi motor inovasi justru tampak kurang kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru. Di kesempatan yang sama, Pak Purbaya juga memastikan jika Danantara memiliki kemampuan untuk menutup pelunasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WHOOSH sebesar Rp 2 triliun, thanks to dividend BUMN yang diterima DANantara senilai Rp 90 triliun.

Pada akhirnya, wajar saja para analis menilai Danantara **belum menjalankan mandatnya secara penuh sebagai lembaga investasi strategis negara** (walaupun dengan dalih 3 bulan terakhir di tahun ini belum sempat bikin proyek, seperti yang dikatakan mereka kepada Pak Purbaya). Bukannya mendatangkan investasi asing dan ciptakan nilai ekonomi baru, Danantara justru berisiko memperdalam beban fiskal negara melalui kewajiban yang dialihkan ke PLN. *Indonesia membutuhkan lembaga investasi yang berani, visioner, dan berorientasi nilai tambah — bukan sekadar perantara proyek yang kesannya main aman di lingkaran birokrasi fiskal.*

## 🗨️ Kiwoom Research Opinion & Recommendation

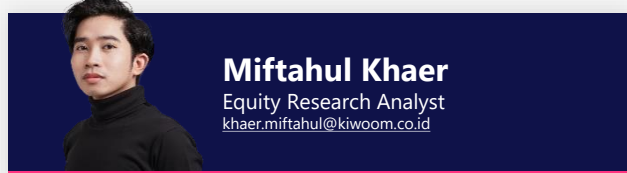
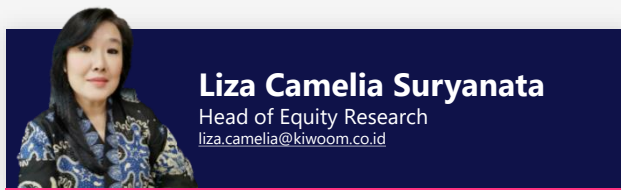
Dari sudut pandang **market intelligence**, persoalan utama Danantara bukan sekadar arah investasi, melainkan kesalahan logika tata kelola. Lembaga investasi negara seharusnya memperluas likuiditas dan membuka kanal pembiayaan baru, bukan hidup dari dana domestik yang hanya berputar di antara institusi negara. Jika Danantara terus menjalankan *“skenario malas”* —mengelola dana BUMN lalu menempatkannya kembali ke proyek pemerintah seperti PLTSa—maka nilai tambah terhadap perekonomian nasional akan nihil. Skema semacam ini tidak menghasilkan pertumbuhan, hanya memindahkan beban fiskal dari satu meja ke meja lain tanpa menciptakan modal baru.

KIWOOM RESEARCH menilai Indonesia justru memiliki peluang besar menjadikan proyek **waste-to-energy (WTE)** sebagai diplomasi ekonomi hijau bernilai global. Negara-negara dengan komitmen kuat terhadap transisi energi seperti **China (target kapasitas energi angin dan surya 2.350–2.780 GW pada 2030)**, **Korea Selatan (porsi RE 21,6% pada 2030 dan 30,6% pada 2036)**, serta **Jepang (porsi RE 36–38% pada 2030)**, semuanya tengah mencari mitra internasional untuk menyalurkan investasi dan memperoleh **carbon offset**. Danantara seharusnya memosisikan diri sebagai capital magnet yang menarik kerja sama **public-private partnership** lintas negara, bukan hanya sebagai penyalur dana domestik. Proyek PLTSa dapat dirancang untuk **menjual listrik hijau lintas batas, mengeksport kredit karbon, serta menarik Foreign Direct Investment (FDI)** dari lembaga global yang berkomitmen mencapai target RE mereka. *Dengan demikian, Indonesia tidak sekedar jadi manajer dana pasif, tetapi juga punya katalis investasi sejati yang berani menembus birokrasi dan membuka arus modal hijau dunia ke dalam negeri.*

## Sumber Rujukan Utama:

1. *Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2025 tentang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA)*
2. *Bloomberg Technoz – Utang Kompensasi & Subsidi PLN Naik 81% Jadi Rp78,4 T per Juni 2025*
3. *JD Supra Legal Review – Presidential Regulation No. 109 of 2025 on Waste-to-Energy Projects*
4. *ASEAN Briefing – Indonesia Officially Launches New Sovereign Wealth Fund: Danantara*
5. *Indonesia Business Post – Danantara–PLN Launch Waste-to-Energy Project to Tackle Indonesia’s Trash Crisis*
6. *Bloomberg Technoz & DetikFinance – Menkeu Purbaya Pertanyakan Keahlian Danantara*

## Kiwoom Research Team



### HEAD OFFICE

Treasury Tower 27th Floor Unit A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28,  
Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Tel : (021) 5010 5800  
Fax : (021) 5010 5820  
Email : [cs@kiwoom.co.id](mailto:cs@kiwoom.co.id)

PT Kiwoom Sekuritas Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK)

### OTHER DISCLOSURES

All Kiwoom's research reports made available to clients are simultaneously available on our own website <http://www.kiwoom.co.id/>. Not all research content is redistributed, e-mailed or made available to third-party aggregators. For all research reports available on a particular stock, please contact your sales representative. Any data discrepancies in this report could be the result of different calculations and/or adjustments.

### DISCLAIMER

This report has been prepared and issued by PT Kiwoom Sekuritas Indonesia. Information has been obtained from sources believed to be reliable but Kiwoom Securities do not warrant its completeness or accuracy. Forward-looking information or statements in this report contain information that is based on forecast of future results, estimates of amounts not yet determinable, assumptions, and therefore involve known and unknown risks and uncertainties which may cause the actual results, performance or achievements of their subject matter to be materially different from current expectations. To the fullest extent allowed by law, PT Kiwoom Sekuritas Indonesia shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses, loss of profits, damages, costs or expenses incurred or suffered by any person or organization arising from reliance on or use of any information contained on this report. The information that we provide should not be construed in any manner whatsoever as, personalized advice. No mention of a particular security in this report constitutes a recommendation to buy, sell or hold that or any security, or that any particular security, portfolio of securities, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. This report is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced by, further distributed to or published in whole or in part by, any other person.